

## **Desain Model Matriks Penilaian Risiko (*Risk Assessment*) dalam Perencanaan Audit Umum (Studi pada Satuan Pengawas Internal (SPI), Bagian Keuangan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Politeknik Negeri Ujung Pandang)**

**Hasiah**

Politeknik Negeri Ujung Pandang  
[hasiahmunir@yahoo.com](mailto:hasiahmunir@yahoo.com)

**Muhammad Arsyad**

Politeknik Negeri Ujung Pandang

**Sukriah**

Politeknik Negeri Ujung Pandang

(*Diterima: 00-Bulan-2016; direvisi: 00-Bulan-2016; dipublikasikan: 00-Desember-2016*)

### **Abstract**

*The objective of this research was to produced the matrices model of risk at Financial and Procurement of Good and Services division of PNUP. The matrices model of risk assesment can be used as a guideline of internal control at Financial and Procurement of Goods and Services division of PNUP. The method used in collecting the data were interview, observation, and questioner distribution. Guidance to assest risk used model of BPKP (2010).*

*The results of this research are matrices of risk mapping at Financial and Procurement of Good and Services division of PNUP, which was gained from three phases. The first, activities and risks identification at Financial and Procurement of Goods and Services unit of PNUP. The second, risk identification and risk assesment of the activities. The third, doing impact analysis and its likelihood in each activity to produce the matrices model of risk priority map at Financial and Procurement of Goods and Services division of PNUP.*

**Keyword:** *Internal Auditor Unit, Risk assesment, Financial division, Procurement of Goods and Services division, Audit Plan.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model matriks penilaian risiko pada Bagian Keuangan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa PNUP. Model matriks penilaian risiko dapat digunakan sebagai pedoman dalam membuat perencanaan audit umum di Bagian SPI PNUP dan sebagai pedoman pengendalian internal untuk Bagian Keuangan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa PNUP. Metode pengumpulan data dengan menggunakan tehnik wawancara, observasi dan penyebaran kuesioner. Panduan Penilaian risiko menggunakan model dari BPKP (2010).

Penelitian ini menghasilkan matriks pemetaan risiko pada bagian keuangan dan bagian pengadaan barang dan jasa PNUP, yang diperoleh dari tiga tahapan. Pertama, mengidentifikasi aktivitas-aktivitas dan risiko pada unit keuangan dan unit pengadaan barang dan jasa PNUP. Kedua, mengidentifikasi risiko dan penilaian risiko aktivitas-aktivitas. Ketiga dilakukan analisis dampak dan kecenderungan terjadi disetiap aktivitas untuk menghasilkan model matriks pemetaan prioritas risiko pada Bagian Keuangan dan Bagian Pengadaan barang dan Jasa PNUP.

**Kata Kunci:** Satuan Pengawas Internal, Penilaian risiko, bagian keuangan, bagian pengadaan barang dan jasa, Perencanaan Audit

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Haryono Umar (2012) menyatakan Inspektorat Jenderal Kementerian pendidikan dan kebudayaan telah membuat beberapa program untuk pengawasan keuangan perguruan tinggi. Salah satunya dengan memberdayakan Satuan Pengawas Intern (SPI) untuk bersama-sama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengawal penggunaan anggaran pemerintah di lingkungan perguruan tinggi. Namun, peran SPI di beberapa perguruan tinggi dipandang masih kurang, hal ini dibuktikan dengan kualitas audit SPI yang belum memadai serta masih banyaknya temuan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan di lingkungan perguruan tinggi.

Keberhasilan kegiatan SPI sebagai audit intern perguruan tinggi banyak bergantung kepada ketepatan dan kesesuaian perencanaan audit dalam mengantisipasi dan mempertimbangkan kebutuhan untuk menentukan pemilihan objek audit, jenis, cakupan, dan tujuan audit yang dilakukan, perkiraan kebutuhan sumber daya audit dan pengalokasian sumber daya audit yang tersedia.

Internal Audit dalam melakukan aktivitasnya mengalami keterbatasan dan kendala. Keterbatasan yang dialami antara lain anggaran biaya, waktu kerja maupun sumber daya auditor (SDM). Kondisi yang demikian memerlukan metode audit efektif dan efisien yang dapat melaksanakan aktivitas pemeriksaan/audit internal dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada. Berdasarkan hal tersebut, Internal Audit perlu merubah pendekatan dalam melakukan audit yaitu dari pendekatan tradisional menuju risk based audit.

Menurut Yayan (2006) tahapan-tahapan dalam risk based audit yang dilakukan oleh auditor adalah: (a) mengidentifikasi tujuan organisasi; (b) menilai risiko dengan cara mengidentifikasi risiko dan mengukur risiko; dan (c) Menetapkan prioritas dalam usaha untuk meminimalisasi risiko.

Menurut Adam (2009), penilaian risiko

merupakan cara untuk mengalokasikan sumber daya audit (tim audit) dan mengidentifikasi area terpenting dalam cakupan audit. Hal ini memungkinkan auditor untuk mendesain program audit untuk menguji pengendalian kunci dengan lebih mendalam. Auditor SPI dalam melakukan penilaian risiko harus melakukan pemahaman secara mendalam mengenai proses bisnis organisasi, termasuk pemahaman atas risiko dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi. Rencana audit didesain untuk mengalokasikan waktu (lamanya audit) lebih banyak pada area yang berisiko tinggi dan mempunyai skala kepentingan yang tinggi bagi tujuan organisasi. Waktu lebih sedikit akan dialokasikan pada area yang mempunyai skala kepentingan yang rendah dan berisiko rendah.

Bagi *auditee*, tahapan penilaian risiko akan berguna untuk mendapatkan gambaran mana risiko minor dan mayor serta mengidentifikasi pengendalian interen yang ada untuk mencegah terjadinya risiko. Jadi dengan adanya penilaian risiko, efisiensi dan keefektifan dalam memberikan pelayanan akan meningkat sehingga instansi pendidikan dapat memberikan pelayanan yang berkesinambungan kepada *stakeholders*.

Penilaian risiko dilakukan dengan beberapa proses, yaitu mulai dari proses penetapan tujuan strategis dan operasional institusi, identifikasi risiko bertujuan untuk menyatakan dan mengkategorikan, membuat daftar risiko dan membuat peta atau profil risiko (BPKP, 2010). Penelitian sebelumnya tentang *risk assessment* dilakukan oleh Yayan (2006) yakni penilaian risiko dilaksanakan dengan mengukur tingkat risiko berdasarkan dampak (*impact*) dan kecenderungan (*likelihood*) yang dijabarkan dalam suatu matriks risiko, yang menggambarkan tingkat risiko kantor cabang. Pengumpulan data untuk “dampak” diperoleh dari identifikasi 29 indikator faktor risiko, sedangkan untuk “kecenderungan” diperoleh dari hasil kuesioner dengan responden terdiri dari beberapa seksi/unit kerja dan pimpinan salah satu kantor cabang. Berdasarkan hasil pengujian penilaian risiko yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa hasil

penilaian risiko cukup mendekati dengan kondisi tingkat risiko kantor cabang yang sebenarnya.

Satuan Pengawas Intern (SPI) PNUP terbentuk secara resmi dengan terbitnya Surat Keputusan Direktur PNUP. Sejalan dengan itu Pembentukan SPI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 jo. Permendiknas Nomor 47 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa salah satu organ Perguruan Tinggi adalah Satuan Pengawas Intern, yang secara struktur berada secara langsung di bawah pimpinan perguruan tinggi. SPI PNUP sebagai internal auditor bertanggung jawab langsung kepada Direktur PNUP. Tugas pokok dan fungsi SPI ditegaskan dengan ditandatanganinya Audit Charter SPI pada bulan Maret 2012 oleh Direktur PNUP. Audit charter mengatur tugas dan tanggung jawab SPI.

Berdasarkan hasil survei awal, ditemukan bahwa sejak SPI PNUP dibentuk tahun 2012 baru 6 unit kerja yang sudah diaudit di PNUP. Hal ini berarti bahwa rata-rata unit kerja yang diaudit pertahun adalah 2 unit. Setelah dilakukan wawancara, bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang efektif dan efisennya tugas audit, yaitu (1) kurangnya tenaga auditor; (2) auditor SPI PNUP yang ada semuanya memiliki tugas pokok sebagai dosen PNUP; (3) kurang kompetennya tenaga auditor SPI (belum memiliki sertifikat internal auditor); (4) belum menerapkan audit berbasis risiko. Salah satu tahapan audit berbasis risiko adalah melakukan penilaian risiko. Penentuan prioritas audit dalam perencanaan audit umum berdasarkan analisis risiko dianggap paling tepat dalam upaya mengalokasikan waktu dan staf auditor yang terbatas. Hal ini tentunya sesuai dengan kondisi jumlah staf audit SPI PNUP yang terbatas, sehingga diharapkan nantinya kinerja dari unit SPI PNUP akan lebih baik jika menerapkan audit berbasis risiko.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana desain model penilaian risiko pada Bagian Keuangan dan Bagian Pengadaan barang dan Jasa PNUP dalam perencanaan audit umum.

## Tujuan Penulisan

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dikemukakan pada bab 1, maka penelitian ini bertujuan untuk mendesain model matriks prioritas risiko pada Bagian Keuangan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Risiko

Menurut Kloman (2000), kata "*risk*" dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Italia kuno yaitu "*riscare*". Risiko mempunyai definisi yang begitu beragam dengan begitu banyak pengertian dan interpretasi, tergantung dari cara orang memandangnya. Risiko dapat dipandang sebagai:

- Sesuatu yang merugikan terjadi (*risk of loss*)
- Suatu ketidakpastian (*risk of volatility*)
- Sesuatu yang menguntungkan tidak terjadi (*risk of lost opportunity*).

Risiko merupakan konsep yang digunakan oleh auditor dan manajemen untuk menyatakan perhatian mereka tentang dampak yang mungkin terjadi atas lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian. Setiap peristiwa yang terjadi dapat mempunyai dampak yang material atau konsekuensi yang signifikan bagi organisasi dan tujuan organisasi. Akibat yang bersifat negatif disebut dengan risiko (*risk*) dan akibat yang bersifat positif disebut dengan kesempatan (*opportunities*).

BPKP (2010) menyimpulkan bahwa risiko bisa timbul dari sumber internal dan sumber eksternal dari suatu instansi pendidikan. Risiko yang berasal dari sumber eksternal mencakup munculnya peraturan perundang-undangan baru, perkembangan teknologi, bencana alam dan gangguan keamanan. Sementara itu sumber internal risiko terdiri atas keterbatasan dana operasional, sumber daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai, kebijakan prosedur yang tidak jelas dan suasana kerja yang tidak kondusif. Selain kedua risiko tersebut, risiko juga bisa disebabkan oleh pengeluaran program yang tidak tepat, pelanggaran terhadap pengendalian dana.

**Mengidentifikasi Risiko**

Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan (PP No. 60 Tahun 2008).

**Tujuan**

Tujuan merupakan tahapan yang sangat kritikal dalam proses manajemen risiko yaitu merekam semua risiko baik yang sudah maupun belum dikendalikan melalui pengendalian inten. Proses yang dilakukan dalam tahap identifikasi risiko adalah:

- 1) Menginventarisasi data kejadian/peristiwa komprehensif yang mempengaruhi organisasi
- 2) Menentukan sumber-sumber risiko, antara lain hubungan bisnis dan hukum, lingkungan ekonomi, perilaku manusia, kejadian alam, lingkungan politik, isu teknologi, aktivitas manajemen dan aktivitas individu.
- 3) Menentukan area yang terkena pengaruh risiko, antara lain aset dan sumber daya, pendapatan, biaya, pegawai, masyarakat, kinerja, waktu dan jadwal aktivitas, lingkungan.
- 4) Menentukan penyebab dan skenario risiko.

**Teknik**

Teknik dan alat bantu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko antara lain adalah *checklist*, justifikasi berdasarkan pengalaman dan catatan historis, *flowchart*, *brainstorming*, analisis sistem, dan analisis skenario.

**Model Risiko**

Sebagai bagian dari tahapan identifikasi risiko, dibuat model risiko untuk memberi gambaran secara komprehensif mengenai peristiwa dan kondisi yang mungkin terjadi, baik yang bersumber dari perubahan di dalam lingkungan eksternal maupun dari unsur proses bisnis internal organisasi. Model risiko dibuat dengan tujuan untuk memberi acuan mengenai peristiwa dan kondisi yang mungkin terjadi serta bagaimana dan mengapa terjadi yang selanjutnya akan digunakan sebagai bahan Analisis.

Ada dua pilihan model pernyataan risiko yang dikembangkan oleh BPKP (2010, yaitu:



**Gambar 1 Model Pernyataan Risiko 1**

Atau



**Gambar 2 Model Pernyataan Risiko 2**

Tahapan-tahap proses identifikasi risiko sebagai berikut: (i) penetapan unit risiko, yaitu penetapan organisasi atau unit mana yang akan diidentifikasi risikonya dan tingkatan risikonya, (ii) pemahaman terhadap tupoksi organisasi/unit yang bersangkutan, (iii) pemahaman terhadap aktivitas utama dari organisasi, (iv) reviu atas kriteria risiko yang ada, mencakup tingkat toleransi risiko, kriteria dampak, kriteria kemungkinan, dan kriteria tingkat keefektifan pengendalian yang sudah ada, (v) pembuatan daftar risiko, dan (vi) pembuatan peta atau profil risiko (BPKP, 2010)

**Menganalisis/Mengukur Risiko**

**Tujuan**

Merupakan tahapan untuk memisahkan risiko minor dan risiko mayor serta mengidentifikasi pengendalian intern yang ada (melalui inspeksi dan *control self assessment*) serta menentukan konsekuensi dan *likelihood*. Sumber data dan informasi yang digunakan untuk menentukan konsekuensi dan *likelihood* adalah catatan masa lalu, justifikasi berdasarkan pengalaman yang relevan, praktik dan pengalaman industri, literatur-literatur, riset pasar, pengujian dan *prototype*, model ekonomi, pertimbangan ahli dan spesialis.

**Teknik**

Teknik yang digunakan untuk menentukan konsekuensi dan *likelihood*

adalah wawancara dengan ahli pada area terkait, memperkerjakan kelompok ahli dengan multi disiplin ilmu, dan penilaian individu menggunakan kuesioner.

**Metode**

Analisis risiko terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

**Analisis Kualitatif, digunakan:**

Untuk memperoleh indikasi umum atas suatu risiko sebelum dilakukan Analisis lebih rinci.

Apabila waktu dan usaha tidak memungkinkan untuk dilakukan Analisis lebih rinci.

Apabila data numerik tidak memadai untuk dilakukan Analisis kuantitatif.

Yang perlu diperhatikan dalam melakukan Analisis dan mengukur risiko adalah faktor-faktor risiko, pengaruhnya serta pemicu (*driver*) dari masing -masing risiko.

**Analisis Semi Kuantitatif**

Dalam Analisis semi kuantitatif, skala kualitatif diberi nilai dan angka.

**Analisis Kuantitatif**

Dalam Analisis kuantitatif, digunakan angka yang didasarkan pada data dari berbagai macam sumber dan Analisis yang dilakukan tergantung pada tingkat keakuratan data.

Konsekuensi diekspresikan dalam nilai uang/kriteria teknis/kriteria manusia, sedangkan *likelihood* diekspresikan dalam probabilitas/ frekuensi/kombinasi antara probabilitas dan frekuensi.

**Definisi Penilaian Risiko (*Risk Assesment*)**

Definisi penilaian risiko (*risk assesment*) dalam buku pegangan bagi anggota IIA sebagai berikut: “*Risk assesment is a systematic process for assesing and integrating professional judgment about probable adverse condition and/or events*”. Maksudnya penilaian risiko (*risk assesment*) adalah suatu proses yang sistematis untuk

menilai dan mengintegrasikan pertimbangan profesional mengenai kemungkinan kondisi yang buruk. Dari definisi tersebut, bahwa audit internal harus melaksanakan perencanaan audit dengan seksama yang mempertimbangkan faktor-faktor risiko pada suatu unit yang akan diperiksa berdasarkan pertimbangan profesional.

**Metode Penilaian Risiko**

Ada 3 (tiga) pendekatan yang dapat digunakan dan masing masing dengan kelebihan dan kekurangannya, yaitu: (1) Pendekatan Database; (2) Pendekatan Algoritma; (3) Pendekatan Matriks

Pendekatan matriks dilakukan dengan menyusun unit-unit bisnis organisasi dan risiko ke dalam baris horisontal dan vertikal. Selanjutnya dilakukan penilaian risiko terhadap setiap jenis risiko bagi setiap unit bisnis dan hasilnya akan tertuang dalam cell, misalnya warna hijau untuk risiko rendah, kuning untuk risiko menengah dan merah untuk risiko tinggi serta putih (kosong) untuk jenis risiko yang tidak dapat diaplikasikan bagi unit bisnis tertentu.

Sebagai pedoman dalam menentukan pendekatan yang akan digunakan dalam menilai risiko, dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1 Jenis Pendekatan dalam Menilai Risiko**

Jenis Pendekatan	Kemudahan Implementasi	Kemudahan Pemeliharaan	Paling Baik Digunakan
Database	Sulit	Sulit	Pedoman Rinci
Algoritma	Sedang	Mudah	Manajemen Operasi
Matriks	Mudah	Sedang	Rencana Strategis

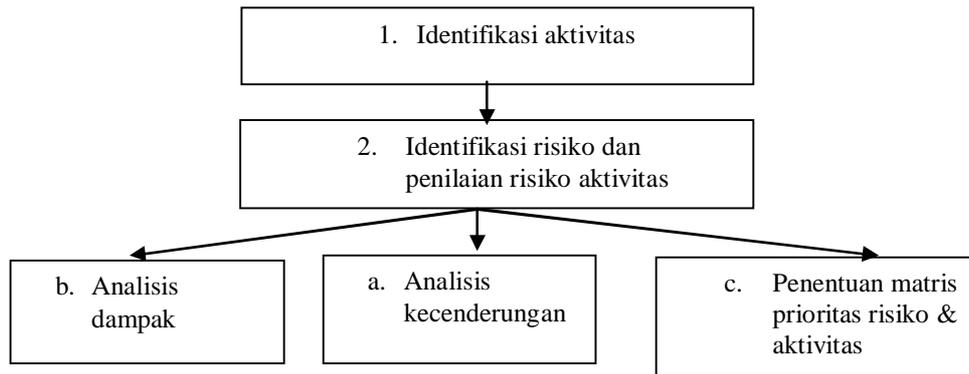
Sumber : Audittindo Education, 2006

**METODE PENELITIAN**

**Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian yang akan dilakukan ditunjukkan dengan skema berikut ini:

### SKEMA TAHAPAN PENELITIAN



Skema 1 Tahapan Penelitian (Sumber: Yayon, 2006)

Berdasarkan skema tersebut, penelitian dilakukan melalui 2 tahapan yaitu:

- a. Mengidentifikasi aktivitas-aktivitas dan risiko-risiko yang dihadapi pada unit keuangan dan unit pengadaan barang dan jasa PNUP. Hasil identifikasi di tahap pertama menjadi data untuk menghasilkan model matriks prioritas aktivitas di tahap kedua.
- b. Menyebarkan kusioner kepada pihak-pihak yang menjalankan aktivitas di bagian keuangan dan bagian pengadaan barang dan jasa untuk melihat frekuensi dan dampak dari setiap risiko. Berdasarkan hasil kusioner tersebut dibuat pemetaan risiko di kedua bagian tersebut, sehingga menghasilkan output dalam bentuk model matriks prioritas risiko.

#### Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah

1. Penelitian Kepustakaan dalam bentuk kajian literatur, peraturan dan kebijakan keuangan pemerintah.
2. Penelitian Lapangan dengan mengamati seluruh aktivitas yang ada di bagian keuangan dan pengadaan barang dan jasa.

#### Subyek dan Lokasi Penelitian

Adapun subyek penelitian adalah aktivitas-aktivitas di bagian keuangan dan pengadaan barang dan jasa yang berlokasi di Politeknik Negeri Ujung Pandang.

#### Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dan sampel dalam penelitian ini menggunakan seluruh aktivitas di bagian keuangan dan bagian pengadaan barang dan jasa.

#### Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari:

- a. Hasil Kusioner
  - b. Hasil wawancara
  - c. Observasi pada aktivitas di bagian keuangan dan pengadaan barang dan jasa.
- Data sekunder berupa aturan, kebijakan, standar operasional prosedur dan laporan keuangan.

#### Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap pimpinan dan staf PNUP di unit yang terkait langsung dengan aktifitas penilaian risiko dalam perencanaan audit umum.

2. Kusioner

Kusioner dibagi menjadi 2 katagori yaitu kusioner berdasarkan aktivitas dan kusioner berdasarkan jenis risiko. Kusioner berdasarkan aktivitas dikelompokkan sesuai dengan jumlah aktivitas di bagian keuangan dan pengadaan barang dan jasa.

Pengukuran dari pernyataan/pertanyaan dalam kusioner dituangkan dalam skala nilai, yaitu nilai 1 jika menurut responden kondisi pernyataan/pertanyaan tersebut

“Selalu” (selalu terjadi atau selalu dilakukan), nilai 2 jika menurut responden kondisi pernyataan/pertanyaan tersebut “Sering” (sering terjadi atau sering dilakukan), nilai 3 jika menurut responden kondisi pernyataan/pertanyaan tersebut “Pernah” (pernah terjadi atau pernah dilakukan tetapi tidak sering), nilai 4 jika menurut responden kondisi pernyataan/pertanyaan tersebut “Tidak Pernah” (tidak pernah terjadi atau tidak pernah dilakukan).

3. Observasi  
Observasi dilakukan langsung terhadap obyek penelitian untuk melengkapi data yang diperlukan.
4. Dokumentasi, berupa studi kepustakaan, jurnal, laporan keuangan, peraturan dan kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah.

**Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi kuantitatif yang dilakukan dengan tujuan untuk mendisain model penilaian risiko berupa matriks prioritas aktivitas dan matriks prioritas risiko. Model yang digunakan untuk penilaian risiko adalah model matriks dengan pertimbangan mudah diimplementasikan terutama untuk tahap awal penilaian resiko.

BPKP (2010) memberikan panduan bagaimana instansi pemerintah melakukan analisis risiko. Langkah-langkah analisis risiko adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kemungkinan/probabilitas/frekuensi terjadinya risiko.

**Tabel 2 Kerangka pengukuran probabilitas/frekuensi**

Probabilitas		Kriteria
Rating	%	
1	0 -10	Sangat tidak mungkin/hampir mustahil
2	10 – 30	Kecil kemungkinan tapi tidak mustahil
3	30 – 50	Kemungkinan terjadi
4	50 – 90	Sering terjadi
5	90	Hampir pasti terjadi

Sumber: BPKP, 2010

**Tabel 3 Ukuran Kualitatif Kemungkinan/Frekuensi**

Level	Deskriptor	Contoh Deskripsi Rinci	Frekuensi
1	Sangat jarang	Kejadiannya muncul hanya dalam keadaan tertentu	Kurang dari sekali dalam 10 tahun
2	Jarang	Kejadiannya muncul hanya pada saat sama	Paling sedikit sekali dalam 10 tahun
3	Moderat	Kejadiannya seharusnya muncul pada saat yang sama	Paling sedikit sekali dalam 5 tahun
4	Sering	Kejadiannya muncul pada kebanyakan situasi	Paling sedikit sekali dalam 1 tahun
5	Hampir pasti/sangat sering	Kejadiannya diharapkan muncul pada kebanyakan situasi	Lebih dari satu kali dalam setahun

Sumber: BPKP, 2010.

2. Menentukan dampak dan besaran dari setiap risiko

**Tabel 4 Kerangka pengukuran Dampak**

Level	Rating Dampak	Keterangan
5	Sangat tinggi/katastropik	Mengancam program dan organisasi serta <i>stakeholders</i> , Kerugian sangat besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politik
4	Besar	Mengancam fungsi program yang efektif dan organisasi. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan maupun politis.
3	Menengah/medium	Mengganggu administrasi program. Kerugian keuangan dan politis cukup besar.
2	Kecil	Mengancam efisiensi dan keefektifan beberapa aspek program. Kerugian kurang material dan sedikit mempengaruhi <i>stakeholders</i> .
1	Sangat rendah/tidak signifikan	Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin. Kerugian kurang material dan tidak mempengaruhi <i>stakeholders</i> .

Sumber: BPKP, 2010

3. Menetapkan status risiko dan peta risiko  
Formula untuk menghitung status risiko menurut BPKP (2010) adalah sebagai berikut:  
Status Risiko = Probabilitas x Dampak

Berikut adalah tabel untuk menentukan peta risiko.

**Tabel 5 Peta Risiko**

Matriks Analisis Risiko			Dampak				
Deskripsi	Prob	Frek	1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Kecil	Medium	Besar	Katastropik
Hampir pasti	90%	5	Moderat	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim	Ekstrim
Kemungkinan Besar	70%	4	Rendah	Moderat	Tinggi	Ekstrim	Ekstrim
Mungkin	50%	3	Rendah	Moderat	Moderat	Tinggi	Ekstrim
Kemungkinan kecil	30%	2	Sangat Rendah	Rendah	Moderat	Moderat	Tinggi
Sangat jarang	10%	1	Sangat rendah	Sangat rendah	Rendah	Rendah	Moderat

Sumber: BPKP, 2010

**Tabel 6 Rating Risiko**

Desripsi	Level	Level dimulai dari status
Ekstrim	5	15
Tinggi	4	10
Moderat	3	5
Rendah	2	3
Sangat rendah	1	1

Sumber: BPKP, 2010.

#### 4. Menentukan respon terhadap risiko

**Tabel 7 Kriteria Respon Risiko**

Status Risiko	Kriteria untuk Manajemen Risiko		Yang Bertanggungjawab
1 – 3	Dapat Diterima	Dengan pengendalian yang cukup	Manajer Operasi
4 – 5	Dipantau	Dengan pengendalian yang cukup	Manajer Operasi
6 – 9	Diperlukan pengendalian Manajemen	Dengan pengendalian yang cukup	Manajer Operasi
10 – 14	Harus menjadi perhatian manajemen ( <i>urgent</i> )	Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik	CEO
15 – 25	Tidak dapat diterima	Dapat diterima hanya dengan pengendalian yang sangat baik	Komisaris

Sumber: BPKP, 2010

## 5. Memberi informasi kepada pimpinan

**Tabel 8 Informasi Pengelolaan Risiko**

Status Risiko	Apa yang Terjadi	Apa yang harus dilakukan
Ekstrim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tujuan dan hasil tidak tercapai</li> <li>• Mengakibatkan kerugian keuangan yang besar</li> <li>• Mengurangi kapabilitas instansi</li> <li>• Reputasi instansi sangat menurun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan bersifat urgen dan aktif yang melibatkan pimpinan tingkat tinggi.</li> <li>• Strategi risiko wajib dilaksanakan secepatnya</li> <li>• Pendekatan yang segera dan tepat serta pelaporan secara rutin.</li> </ul>
Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beberapa tujuan dan hasil tercapai</li> <li>• Mengakibatkan kerugian keuangan yang cukup besar</li> <li>• Mengurangi kapabilitas instansi</li> <li>• Cukup menurunkan reputasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu pengelolaan aktif dan revidi rutin</li> <li>• Strategi harus dilaksanakan terutama difokuskan pada pemeliharaan kendali yang sudah baik.</li> <li>• Pendekatan yang tepat.</li> </ul>
Medium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengganggu kwaloitias atau ketepatan waktu dari tujuan dan hasil.</li> <li>• Mengakibatkan kerugian keuangan yang dapat diterima dengan wajar.</li> <li>• Mengurangi kapabilitas dalam tingkatan normal</li> <li>• Menurunkan reputasi dalamn tingkat wajar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu pengelolaan dan revidi secara rutin.</li> <li>• Perlu pengendalian intern yang efektif dan pemantauan.</li> <li>• Strategi risiko harus dilaksanakan.</li> </ul>
Rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengganggu kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu dari tujuan dan hasil</li> <li>• Mengakibatkan kerugian keuangan, penurunan kapabilitas dan reputasi tidak besar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosedur rutin yang cukup untuk menanggung dampak.</li> <li>• Perlu pengendalian intern yang efektif.</li> <li>• Strategi yang fokus pada pemantauan dan revidi terhadap prosedur pengendalian yang sudah ada.</li> </ul>
Sangat Rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak terhadap pencapaian tujuan sangat kecil.</li> <li>• Kerugian keuangan, penurunan kapabilitas, dan reputasi adalah sangat kecil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanya perlu pemantauan singkat.</li> <li>• Pengendalian normal sudah mencukupi.</li> <li>• Jika sama sekali tidak diperhatikan, risiko-risiko ini dapat meningkatkan statusnya/prioritasnya.</li> </ul>

Sumber: BPKP, 2010.

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Hasil Penelitian**

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berdasarkan aktivitas dan risiko yang terjadi sesuai dengan jumlah tugas pokok bendahara di bagian keuangan dan di bagian pengadaan barang dan jasa dengan total pertanyaan

adalah sebanyak 24 (dua puluh empat) pertanyaan.

Responden dari kuesioner tersebut terdiri dari 2 bagian/unit kerja, yaitu bagian keuangan yang terdiri dari aktivitas bendahara pengeluaran pembantu peningkatan pendidikan tinggi (BPP-P2T); aktivitas bendahara pengeluaran pembantu – PDD dan BOPTN (program studi diluar domisili dan

bantuan operasional perguruan tinggi); aktivitas bendahara penerimaan; aktivitas bendahara pengelola administrasi belanja pegawai dan aktivitas bagian pengadaan barang dan jasa. Jenis kuesioner terdiri dari dua, yaitu kuesioner kecenderungan terjadinya risiko dan kuesioner dampak terjadinya risiko. Setiap bagian (bendahara di bagian keuangan dan kepala unit pengadaan barang dan jasa) diberikan kuesioner sesuai dengan aktivitas yang dilakukan dan jenis risiko.

**Identifikasi Aktivitas dan risiko pada Bagian Keuangan dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa PNUP**

Identifikasi aktivitas dan risiko di bagian keuangan dan bagian pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan memberikan formulir daftar isian kepada setiap staf yang menangani aktivitas keuangan dan pengadaan barang dan jasa di PNUP. Hasil identifikasi aktivitas dan risiko menghasilkan daftar aktivitas dan daftar risiko di kedua bagian tersebut.

**Identifikasi aktivitas dan risiko pada bagian keuangan untuk ke 4 bendara, yaitu:**

**Tabel 9 Identifikasi aktivitas (A) dan risiko (R) pada Administrasi Belanja Pegawai Bendahara**

Kode	Jenis Aktivitas	Kode	Jenis Risiko
A1.	Menginput data mutasi pegawai.	R1	Adanya komplain dari pegawai terkait dengan perbedaan antara data dengan jumlah uang yang diterima.
A2.	Membuat daftar gaji	R2	Kesalahan pengiputan data mutasi pegawai.
A3.	Membuat daftar kekurangan gaji pegawai.		
A4.	Membuat daftar uang makan pegawai.	R3	Keterlambatan pembuatan daftar gaji pegawai
A5.	Membuat daftar sertifikasi dosen.	R4	Kesalahan penginputan daftar gaji.
A6.	Membuat daftar pemotongan pegawai.	R5	Lambatnya pembuatan daftar kekurangan gaji pegawai
A7.	Membuat daftar pemindahbukuan dan pengantar ke bank.	R6	Kesalahan penginputan daftar kekurangan gaji.
A8.	Perincian gaji pegawai	R7	Lambatnya pembuatan daftar uang makan pegawai
A9.	Mengantar berkas SPM ke KPPN.		
		R8	Kesalahan penginputan daftar UMP.
		R9	Lambatnya pembuatan daftar sertifikasi dosen
		R10	Kesalahan penginputan daftar sertifikasi dosen
		R11	Lambatnya pembuatan daftar pemotongan pegawai
		R12	Kesalahan penginputan daftar pemotongan pegawai.
		R13	Lambatnya pembuatan daftar pemindahbukuan.
		R14	Kesalahan penginputan, pembuatan daftar pemindahbukuan
		R15	Lambatnya perincian gaji pegawai
		R16	Kesalahan penginputan daftar perincian gaji pegawai.
		R17	Lambatnya pengantaran berkas ke KPPN

Sumber: Data diolah

**Tabel 10 Identifikasi aktivitas (A) dan risiko (R) pada Bendahara Penerimaan**

Kode	Jenis Aktivitas	Kode	Jenis Risiko
A1.	Menerima dan menyimpan dana PNBPN yang bersumber dari pendapatan uang pendidikan (SPP), pendapatan ujian masuk, dan pendapatan pendidikan lainnya.	R1	Kesalahan dalam menghitung jumlah penerimaan
		R2	Kehilangan uang
		R3	Ketidakcocokan antara jumlah uang dengan bukti pembayaran
		R4	Tidak lengkapnya bukti penerimaan PNBPN.
A2.	Menerima dan menyimpan dana titipan dari unit lain seperti dari Hubungan Industri dll.	R5	Terlambatnya penyetoran PNBPN ke kas negara.
		R6	Kesalahan dalam menginput jenis transaksi dan jumlahnya
A3.	Menerima dan memeriksa keabsahan bukti-bukti penerimaan PNBPN yang dibayar oleh wajib bayar seperti pembayaran SPP.	R7	Keterlambatan pembuatan BKU
		R8	Kesalahan dalam pengklasifikasian transaksi
		R9	Kesalahan dalam penginputan
A4.	Menerima dan memeriksa keabsahan bukti-bukti penerimaan dana titipan	R10	Keterlambatan pembuatan buku pembantu
		R11	Keterlambatan dalam pembuatan laporan realisasi.
A5.	Melakukan penyetoran PNBPN ke kas negara	R12	Kesalahan dalam penentuan nilai mutasi dan LPJ
A6.	Membuat Buku Kas UMUM secara bulanan.	R13	Kesalahan dalam penentuan jenis-jenis penerimaan PNBPN
A7.	Membuat buku pembantu PNBPN fungsional dan buku pembantu dana titipan secara bulanan.	R14	Keterlambatan dalam pembuatan laporan.
		R15	Perbedaan antara bank dan catatan
		R16	Perbedaan antara data akademik dengan catatan
A8.	Membuat laporan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBPN) secara bulanan	R17	Ketidakkengkapan dokumen.
A9.	Membuat laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan (LPJ).		
A10.	Membuat laporan inventarisasi sumber-sumber PNBPN instansi secara bulanan.		
A11.	Membuat register penutupan kas bendahara penerimaan secara bulanan.		
A12.	Melakukan rekonsiliasi dengan bank yang terkait dengan penerimaan PNBPN.		
A13.	Melakukan rekonsiliasi dengan bagian akademik terkait dengan pembayaran mahasiswa.		
A14.	Melakukan rekonsiliasi laporan manual PNBPN dengan unit akuntansi.		
A15.	Melakukan persiapan dokumen yang terkait dengan PNBPN.		

Sumber: Data diolah

**Tabel 11 Identifikasi aktivitas (A) dan risiko (R) Bendahara pengeluaran pembantu-PDD & BOPTN**

Kode	Jenis Aktivitas	Kode	Jenis Risiko
A1.	Menatausahakan penerimaan dan pengeluaran uang persediaan	R1	Kesalahan Pendistribusian pembayaran tunai
A2.	Pengajuan pertanggungjawaban atas pengeluaran belanja	R2	Kesalahan pencatatan transaksi
A3.	Membuat kuitansi (SPB) atas Pengeluaran	R3	Keterlambatan pengajuan pertanggungjawaban.
A4.	Uang Persediaan (UP)	R4	Ketidak lengkapan bukti pengeluaran belanja
A5.	Melakukan pemotongan dan penyetoran pajak ke kas negara	R5	Kesalahan pencatatan nilai dan transaksi
A6.	Membuat laporan atas penyetoran pajak	R6	Salah pembebanan mata anggaran dan nilai kuitansi
A7.	Mengajukan usulan pertanggungjawaban atas uang persediaan	R7	Keterlambatan pengetoran pajak
A8.	Membuat pembukuan berupa buku kas harian, buku kas umum dan lain-lain atas penerima dan pengeluaran belanja	R8	Salah pemotongan
A9.	Mendokumentasikan seluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen lainnya	R9	Kesalahan pembebanan jenis dan kode
A10.	Membuat laporan realisasi penggunaan anggaran	R10	Keterlambatan membuat penetoran pajak
		R11	Kesalahan pencatatan NTPN, tanggal dan tempat penyetoran pajak
		R12	Keterlambatan penyetoran kelengkapan berkas.
		R13	Kesalahan menginput data
		R14	Keterlambatan penyelesaian pencatatan
		R15	Ketidak lengkapan bukti
		R16	Keterbatasan waktu penyelesaian
		R17	Keterlambatan membuat laporan.

Sumber: Data diolah

**Tabel 12 Identifikasi aktivitas (A) dan risiko (R) Bendahara pengeluaran pembantu Peningkatan Pendidikan Tinggi (BPP-P2T)**

Kode	Jenis Aktivitas	Kode	Jenis Risiko
A1.	Menerima dan mencermati keabsahan kelengkapan bukti-bukti dan surat-surat pertanggungjawaban yang masuk sebagai bahan pembayaran	R1	Ketidak lengkapan bukti
A2.	Membuat kuitansi uang persediaan (UP) berdasarkan bukti-bukti dan surat-surat pertanggungjawaban yang masuk	R2	Kesalahan pembebanan dan nilai kuitansi
A3.	Menatausahakan penerimaan dan pengeluaran UP	R3	Ketidak cukupan uang persediaan
A4.	Melakukan pemotongan dan penyetoran pajak ke kas negara atas belanja UP	R4	Keterlambatan penyetoran pajak
A5.	Mengajukan usulan GUP atas pertanggungjawaban belanja UP	R5	Kesalahan pemotongan , salah jenis dan kode pajak.
A6.	Membuat pembukuan berupa buku kas umum dan buku pembantu atas penerimaan dan pengeluaran belanja	R6	Kesalahan pembebanan dan nilai kuitansi
A7.	Membuat laporan pertanggungjawaban belanja	R7	Keterlambatan penyelesaian laporan
A8.	Mendokumentasikan seluruh bukti penerimaan dan pengeluaran UP serta dokumen lainnya secara tertib dan teratur.	R8	Kesalahan pencatatan/penginputan.
A9.	Menerima dan mencermati keabsahan surat tugas/SK sebagai dasar pembuatan daftar honorarium.	R9	Kesalahan pengidentifikasian SK
A10.	Membuat daftar honorarium	R10	Kesalahan penginputan.

Sumber: Data diolah

**Tabel 13 Identifikasi aktivitas (A) dan risiko (R) Bagian Pengadaan Barang dan jasa**

Kode	Jenis Aktivitas	Kode	Jenis Risiko
A1	Memonitoring Perkembangan pendaftar Calon penyedia mendownload pengadaan yang telah diupload panitia melalui LPSE	R1	Adanya pengaduan dari calon penyedia atas lambatnya koneksi ke LPSE karena terjadi masalah pada server.
A2	Memberi penjelasan kepada calon penyedia yang bertanya secara online dan melibatkan user.	R2	Adanya pengaduan/protes dari calon penyedia atas spesifikasi yang dilelangkan karena kadang-kadang panitia mengupload spesifikasi barang ada yang mengarah ke produk/merek tertentu tanpa disengaja.
A3	Calon penyedia mengupload dokumen pengadaan.	R3	Kadang-kadang panitia kewalahan untuk menjawab pertanyaan yang masuk karena usernya tidak sempat hadir.
A4	Panitia mendownload dokumen pengadaan kemudian melakukan Apendo dokumen penawaran tersebut.	R4	Melakukan perpanjangan jadwal akibat lambatnya koneksi ke LPSE karena terjadi masalah pada server.
A5	Mengevaluasi dokumen penawaran yang telah diupload oleh calon penyedia melalui LPSE yang telah diapendo, antara lain: (a) evaluasi dokumen administrasi dan kualifikasi (Lengkap: Lanjut ke evaluasi teknis) dan tidak lengkap gugur; (b) evaluasi domune teknis (sesuai dengan yang dipersyaratkan: lanjut ke evaluasi harga) dan tidak sesuai/lengkap gugur; (c) evaluasi dokumen harga melakukan koreksi aritmatik kemudian mengundang 3 (tiga) calon penyedia untuk penawaran terendah untuk melakukan pembuktian kualifikasi.	R5	Banyaknya merk atau produk yang ditawarkan oleh masing-masing calon penyedia dan berbeda dengan usulan user.
A6	Mengevaluasi dan melakukan pembuktian kualifikasi kepada calon penyedia yang lulus administrasi, teknis dan harga.	R6	Gagalnya pelelangan apabila calon penyedia tidak ada yang hadir pembuktian kualifikasi dan apabila calon penyedia hadir namun tidak dapat memperlihatkan dokumen asli yang dipersyaratkan sehingga panitia harus melakukan Pelelangan ulang
A7	Mengupload Berita acara hasil pelelangan tujuannya untuk diketahui oleh calon penyedia yang mengikuti pelengan.	R7	Adanya tuntutan dari calon penyedia apabila hasil pelengan tidak diupload dan dianggap ada terjadi KKN antar pemenang dengan panitia.
A8	Menetapkan pemenang pelelangan yang memenuhi syarat.	R8	Adanya tekanan dari intern PNUP apabila yang kami tetapkan sebagai pemenang, produk/merk yang ditawarkan berbeda dengan merk/produk yang ditawarkan oleh pemenang.
A9	Mengumumkan pemenang pelelangan yang memenuhi syarat.	R9	Terhambatnya proses penandatanganan kontrak kepada pemenang apabila calon penyedia yang menyanggah mengajukan sanggah banding ke kementerian pendidikan, serta ditembuskan ke BPK, kepolisian dll.
A10	Menjawab sanggahan dari calon penyedia yang masuk secara online melalui LPSE	R10	Audit khusus oleh ispektorat atas sanggahan banding yang telah dilakukan oleh calon penyedia.
A11	Panitia menyerahkan dokumen penawaran bagi pemenang pelelangan kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk dibuatkan SPPBJ, SPMK, dan Kontrak.	R11	Audit investigasi atas sanggahan banding yang telah dilakukan oleh calon penyedia
		R12	Sering didatangi oleh pihak LSM dengan ancaman tertentu.

Sumber: Data diolah

**Desain Penilaian Risiko pada Bagian Keuangan PNUP**

Penilaian risiko didesain dengan menggunakan model matriks dari BPKP tahun 2010. Desain model penilaian risiko dapat memperlihatkan peta risiko yang telah teridentifikasi, apakah risiko tersebut berada pada level ekstrim, tinggi, moderat, rendah dan sangat rendah. Besarnya nilai level risiko atau *risk exposure* ditentukan dari hasil perkalian antara frekuensi (F) dengan dampak risiko (D).

**Desain Penilaian Risiko pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**

Berdasarkan hasil perhitungan level risiko pada bagian Keuangan dan bagian pengadaan barang dan jasa di tabel 6, maka penilaian risiko didesain dengan model matriks yang menggambarkan letak posisi masing-masing peristiwa risiko dengan keterangan kode risiko yang telah ditentukan.

L I K E L I H O  O D	5	5	10	15	20	25						
	4	4	8	12	16	20						
	3	3	6	9	12	15						
	2	2	4	6	8 R1,R2,R6,R7,R9	10						
	1	1	2	3	4 R3,R4, R6,R8,R10,R1 R5 1 R8,R10,R11 S/D R16	5 R1 7						
		1	2	3	4	5						
		C	O	N	S	E	Q	U	E	N	C	E

Gambar 3 Matriks Pemetaan Risiko pada Bendahara Administrasi Belanja Pegawai

L I K E L I H O  O D	5	5	10	15	20	25						
	4	4	8	12	16	20						
	3	3	6	9	12 R3,R9	15 R1						
	2	2	4	6	8 R6	10 R4, R5						
	1	1	2	3	4 R11,R13	5 R12						
		1	2	3	4	5						
		C	O	N	S	E	Q	U	E	N	C	E

Gambar 4 Matriks Pemetaan Risiko pada Bendahara Penerimaan

L I K E L I H O O D	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12 R5	15
	2	2	4	6 R16	8 R4,R9 R10,R12 S/D R15	10 R1, R6, R7, R8
	1	1	2	3	4 R2	5 R3
		1	2	3	4	5
		C O N S E Q U E N C E				

Gambar 5 Matris Pemetaan Risiko pada Bendahara Pengeluaran Pembantu PDD & BOPTN

L I K E L I H O O D	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6 R1,R6 R7,R8,R9,R10	8 R2	10 R3
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		C O N S E Q U E N C E				

Gambar 6 Matris Pemetaan Risiko pada Bendahara Pengeluaran Pembantu Peningkatan Pendidikan Tinggi (BPP-P2T)

L I K E L I H O O D	5	5	10	15	20	25
	4	4	8	12	16 R8	20
	3	3	6	9 R2	12	15
	2	2	4	6	8	10 R6
	1	1	2	3	4	5 R7 R9 S/D R12
		1	2	3	4	5
		C O N S E Q U E N C E				

Gambar 7 Matris Pemetaan Risiko Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

**PEMBAHASAN**

**Implementasi Model Matris Prioritas Risiko dalam Perencanaan Audit Umum**

Unit Satuan Pengawas Internal PNUP dalam menyusun rencana audit tahunan, akan mencoba menggunakan penilaian tingkat risiko (*Risk Based Assessment*) sebagai dasar dalam penentuan objek dan frekuensi audit umum dengan harapan dapat meningkatkan kinerja SPI PNUP.

Dalam tahap-tahap perencanaan audit, mencakup beberapa langkah-langkah dimana salah satu langkah yaitu pendekatan dalam pemilihan *auditee* yaitu pendekatan *risk-*

*based*. Untuk melaksanakan audit berbasis risiko auditor harus menetapkan tingkat prioritas berdasarkan risiko. Untuk itu berdasarkan hasil desain matris pemetaan risiko pada gambar 1 s/d 5, maka dapat diketahui risiko yang perlu mendapat prioritas dan perhatian utama dalam perencanaan audit umum oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) PNUP dari tingkatan ekstrim sampai dengan sangat rendah.

Berikut ini urutan prioritas risiko pada bidang keuangan dan pengadaan barang dan jasa.

**Tabel 14 Urutan prioritas risiko pada Bagian Keuangan – Bendahara Administrasi belanja Pegawai**

Kode	Jenis Risiko	Nilai	Level Risiko
R1	Adanya komplain dari pegawai terkait dengan perbedaan antara data dengan jumlah uang yang diterima.	8	Moderat
R2	Kesalahan penginputan data mutasi pegawai	8	Moderat
R5	Lambatnya pembuatan daftar kekurangan gaji pegawai	8	Moderat
R7	Lambatnya pembuatan daftar uang makan pegawai	8	Moderat
R9	Lambatnya pembuatan daftar sertifikasi dosen	8	Moderat
R17	Lambatnya pengantaran berkat ke KPPN	5	Rendah
R3	Keterlambatan pembuatan daftar gaji pegawai	4	Rendah
R4	Kesalahan penginputan daftar gaji	4	Rendah
R6	Kesalahan penginputan daftar kekurangan gaji.	4	Rendah
R8	Kesalahan penginputan daftar UMP.	4	Rendah
R10	Kesalahan penginputan daftar sertifikasi dosen	4	Rendah
R11	Lambatnya pembuatan daftar pemotongan pegawai	4	Rendah
R12	Kesalahan penginputan daftar pemotongan pegawai.	4	Rendah
R13	Lambatnya pembuatan daftar pemindahbukuan	4	Rendah
R14	Kesalahan penginputan, pembuatan daftar pemindahbukuan	4	Rendah
R15	Lambatnya perincian gaji pegawai	4	Rendah
R16	Kesalahan penginputan daftar perincian gaji pegawai.	4	Rendah

Sumber: data diolah

**Tabel 15 Urutan Prioritas Risiko pada Bagian Keuangan – pada Bendahara Penerimaan**

Kode	Jenis Risiko	Nilai	Level Risiko
R1	Kesalahan dalam menghitung jumlah penerimaan	15	Ekstrim
R2	Kehilangan uang	15	Ekstrim
R14	Keterlambatan membuat laporan	15	Ekstrim
R17	Ketidak lengkapan dokumen	15	Ekstrim
R3	Ketidak cocokan antara jumlah uang dengan bukti pembayaran	12	Tinggi
R7	Keterlambatan pembuatan BKU	12	Tinggi
R8	Kesalahan dalam mengklasifikasian transaksi	12	Tinggi
R9	Kesalahan dalam menginputan	12	Tinggi
R15	Perbedaan antara bank dan catatan	12	Tinggi
R16	Perbedaan antara data akademik dengan catatan	12	Tinggi
R4	Tidak lengkapnya bukti penerimaan PNBPN	10	Tinggi
R5	Terlambatnya penyetoran PNBPN ke kas negara	10	Tinggi
R12	Kesalahan dalam penentuan nilai mutasi dan LPJ	10	Tinggi
R10	Keterlambatan pembuatan buku pembantu	9	Moderat
R6	Kesalahan dalam menginput jenis transaksi dan jumlahnya	8	Moderat
R11	Keterlambatan dalam pembuatan laporan realisasi	8	Moderat
R13	Kesalahan dalam penentuan jenis-jenis penerimaan PNBPN	8	Moderat

Sumber: Data diolah

**Tabel 16 Urutan Prioritas Risiko pada Bagian Keuangan – pada Bendahara Pengeluaran Pembantu-PDD & BOPTN**

Kode	Jenis Risiko	Nilai	Level Risiko
R1	Kesalahan Pendistribusian pembayaran tunai	10	Tinggi
R3	Keterlambatan pengajuan pertanggungjawaban	10	Tinggi
R6	Salah pembebanan mata anggaran dan nilai kuitansi	10	Tinggi
R7	Keterlambatan pengetoran pajak	10	Tinggi
R8	Salah pemotongan	10	Tinggi
R4	Ketidak lengkapan bukti pengeluaran belanja	8	Moderat
R5	Kesalahan pencatatan nilai dan transaksi	8	Moderat
R9	Kesalahan pembebanan jenis dan kode	8	Moderat
R10	Keterlambatan membuat penyetoran pajak	8	Moderat
R12	Keterlambatan penyetoran kelengkapan berkas.	8	Moderat
R13	Kesalahan menginput data	8	Moderat
R14	Keterlambatan penyelesaian pencatatan	8	Moderat
R15	Ketidak lengkapan bukti	8	Moderat
R11	Kesalahan pencatatan NTPN, tanggal dan tempat penyetoran pajak	6	Moderat
R16	Keterlambatan membuat laporan	6	Moderat
R4	Kesalahan pencatatan transaksi	4	Rendah

Sumber: Data diolah

**Tabel 17 Urutan Prioritas Risiko pada Bagian Keuangan – Bendahara Pengeluaran Pembantu Peningkatan Pendidikan Tinggi (BPP-P2T)**

Kode	Jenis Risiko	Nilai	Level Risiko
R3	Ketidak cukupan uang persediaan	10	Tinggi
R2	Kesalahan pembebanan uang persediaan	8	Moderat
R1	Ketidak lengkapan bukti	6	Moderat
R6	Kesalahan pembebanan dan nilai kuitansi	6	Moderat
R7	Keterlambatan penyelesaian laporan	6	Moderat
R8	Kesalahan pencatatan/penginputan.	6	Moderat
R9	Kesalahan pengidentifikasian SK	6	Moderat
R10	Kesalahan penginputan	6	Moderat
R5	Kesalahan pemotongan, salah jenis dan kode pajak	3	Rendah

Sumber: Data diolah

**Tabel 18 Urutan Prioritas Risiko pada Bagian Keuangan – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**

Kode	Jenis Risiko	Nilai	Level Risiko
R8	Adanya tekanan dari intern PNUP apabila yang kami tetapkan sebagai pemenang, produk/merk yang ditawarkan berbeda dengan merk/produk yang ditawarkan oleh pemenang.	12	Tinggi
R10	Gagalnya pelelangan apabila calon penyedia tidak ada yang hadir pembuktian kualifikasi dan apabila calon penyedia hadir namun tidak dapat memperlihatkan dokumen asli yang dipersyaratkan sehingga panitia harus melakukan Pelelangan ulang	10	Tinggi
R2	Adanya pengaduan/protes dari calon penyedia atas spesifikasi yang dilelangkan karena kadang-kadang panitia mengupload spesifikasi barang ada yang mengarah ke produk/merk tertentu tanpa disengaja.	9	Moderat
R7	Adanya tuntutan dari calon penyedia apabila hasil pelengan tidak diupload dan dianggap ada terjadi KKN antar pemenang dengan panitia.	5	Moderat
R10	Audit khusus oleh ispektorat atas sanggahan banding yang telah dilakukan oleh calon penyedia	5	Moderat
R11	Audit investigasi atas sanggahan banding yang telah dilakukan oleh calon penyedia	5	Moderat
R12	Sering didatangi oleh pihak LSM dengan ancaman tertentu.	5	Moderat
R1	Adanya pengaduan dari calon penyedia atas lambatnya koneksi ke LPSE karena terjadi masalah pada server.	4	Rendah
R4	Melakukan perpanjangan jadwal akibat lambatnya koneksi ke LPSE karena terjadi masalah pada server.	4	Rendah
R5	Banyaknya merk atau produk yang ditawarkan oleh masing-masing calon penyedia dan berbeda dengan usulan user.	4	Rendah
R3	Kadang-kadang panitia kewalahan untuk menjawab pertanyaan yang masuk karena usernya tidak sempat hadir.	3	Rendah

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel di atas semua aktivitas di bagian keuangan dan pengadaan barang dan jasa memiliki risiko yang beragam. Namun SPI PNUP sebaiknya dalam membuat perencanaan audit umum perlu menetapkan prioritas audit berdasarkan hasil pemetaan risiko di kedua bagian tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Model/*design* penilaian risiko dalam penelitian ini dilaksanakan dengan mengukur tingkat risiko berdasarkan Dampak (*Impact*) dan Kecenderungan (*likelihood*) yang dijabarkan dalam suatu matriks risiko, untuk menggambarkan tingkat risiko pada bagian Keuangan dan bagian Pengadaan Barang dan jasa. Penilaian risiko dibuat berdasarkan risiko per jenis aktivitas pada Bendahara Administrasi Belanja Pegawai, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran-PDD & BOPTN, Bendahara Pengeluaran Pembantu Peningkatan pendidikan Tinggi (BPP-P2T), dan Bagian Pengadaan Barang dan jasa.

Hasil penilaian risiko berdasarkan risiko aktivitas dapat diketahui nilai total tingkat risiko Bendahara Administrasi berada pada level 8 (tinggi), Bendahara penerimaan berada pada level 12 (tinggi), Bendahara Pengeluaran pembantu-PDD & BOPTN berada pada level 8 (tinggi), Bendahara Pengeluaran pembantu Peningkatan Pendidikan Tinggi (BPP-P2T) berada pada level 6 (Moderat), bagian Pengadaan barang dan jasa berada pada level 5 (Moderat). Sehingga kedepan SPI PNUP diharapkan menggunakan matriks pemetaan prioritas risiko sebagai dasar untuk membuat perencanaan auditnya.

### Saran

(1) Institusi PNUP, terutama bagian Keuangan, bagian Pengadaan Barang dan jasa, dan Bagian Satuan Pengawas Internal. mendukung penyempurnaan penerapan *Risk Assessment* dalam perencanaan audit umum, yaitu dengan menyediakan program aplikasi sebagai alat untuk mempermudah dan mempercepat proses penilaian risiko sehingga dapat meminimalkan tingkat kesalahan dalam proses pengisian data kedalam indikator risiko dan proses penilaiannya tidak membutuhkan waktu yang lama; (2) Pelaksanaan audit tidak dilakukan kepada seluruh audit universe tetapi harus dilakukan secara prioritas berdasarkan tingkat risiko dari masing-masing audit universe tersebut. Untuk audit universe yang

mempunyai tingkat risiko tinggi harus dilakukan audit minimal 6 (enam) bulan sekali, untuk audit universe yang mempunyai risiko sedang harus dilakukan audit minimal 12 (dua belas) bulan sekali, sedangkan untuk audit universe yang mempunyai tingkat risiko rendah akan dilakukan audit setiap 18 bulan sekali, sehingga pelaksanaan audit dapat dilakukan secara optimal dengan tenaga Auditor yang sangat terbatas; (3) Untuk Peneliti selanjutnya, melakukan pengujian kembali atas model dan instrumen-instrumen yang digunakan, karena model yang diajukan masih relatif baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andian, 2011, *Implementasi Penilaian Risiko dalam Menunjang Pencapaian Tujuan Instansi pendidikan*, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. IX No. 2, Hal 16-31.
- Audittindo Education, 2006, *An Introductory Course for Implementing Risk-Based Auditing*, PT Audittindo Arin Prima, Jakarta.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2010, *Penilaian Risiko*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Jakarta.
- Kloman, H Felix and Seawrack, 2000, *Risk Management Reports., volume 27*. Press Inc. Review Against the Gods : The remarkable Story of risk by Peter Bernstein.
- Pemerintah Indonesia, 2008, *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*, Biro Peraturan Perundang-undangan Bagian Politik dan Kesejahteraan Rakyat, Jakarta.
- Toky. Y, 2011, *Pergeseran Paradigma Audit Internal Tradisional Menjadi Audit yang Memberikan Nilai Tambah Bagi Organisasi (Studi Kasus pada PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.)*
- Umar, Haryono. 2012. *Diklat Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat*. *Diklat pada tanggal 4—10 November 2012*, Bandung
- Yayon, W.S, 2006, *Pemodelan Penilaian Risiko dalam Perencanaan Audit umum pada Divisi Interen (Studi kasus pada bank PT ABC Cabang Jakarta)*.
- Yunus, F & Bambang W, 2012, *Model Strategi dan Pemetaan Prioritas Program Auditabel Units Berbasis Resiko Pada Politeknik Negeri Media Kreatif*, Epigram, Vol. 9 No. 2, hal.150-158.